



ANALISIS PERKEMBANGAN, FAKTOR, DAMPAK, DAN UPAYA PENAGGULANGAN KORUPSI DI WILAYAH INDONESIA-ASIA TENGGARA

Nurul Madinah¹

¹Universitas Khairun, Ternate

E-mail: nurulmadinah@gmail.com

Abstrak

Korupsi merupakan masalah sosial-ekonomi-hukum yang meresap di banyak negara, termasuk Indonesia dan wilayah Asia Tenggara. Artikel ini bertujuan memberikan tinjauan komprehensif tentang korupsi, mulai dari definisi dan sejarah perkembangannya, faktor penyebab yang mendasar, dampak yang luas terhadap perekonomian, masyarakat, dan tata negara, serta upaya penanggulangan yang telah dilakukan baik di tingkat nasional maupun internasional. *Body tone* artikel ini disusun secara analitis dan ilmiah, dengan menggunakan data dari lembaga terpercaya seperti *Transparency International*, Bank Dunia, dan penelitian ilmiah terbaru. Melalui struktur dan nada yang teratur, artikel ini menunjukkan bahwa korupsi bukan hanya masalah kejahatan individu, melainkan fenomena terstruktur yang dipengaruhi oleh sistem politik, budaya, dan ekonomi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penanggulangan korupsi membutuhkan upaya terintegrasi antara pemerintah, masyarakat sipil, dan sektor swasta, dengan penekanan pada peningkatan akuntabilitas, transparansi, dan pendidikan antikorupsi.

Kata Kunci: Korupsi, Akuntabilitas, Transparency International, KPK.

Pendahuluan

Korupsi merupakan masalah sosial-ekonomi-hukum yang meresap di banyak negara, termasuk Indonesia dan wilayah Asia Tenggara. Artikel ini bertujuan memberikan tinjauan komprehensif tentang korupsi, mulai dari definisi dan sejarah perkembangannya, faktor penyebab yang mendasar, dampak yang luas terhadap perekonomian, masyarakat, dan tata negara, serta upaya penanggulangan yang telah dilakukan baik di tingkat Nasional maupun internasional. Dengan menggunakan data dari lembaga terpercaya seperti *Transparency International*, Bank Dunia, dan penelitian ilmiah terbaru, artikel ini menunjukkan bahwa korupsi bukan hanya masalah kejahatan individu, melainkan fenomena terstruktur yang dipengaruhi oleh sistem politik, budaya, dan ekonomi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penanggulangan korupsi membutuhkan upaya terintegrasi antara pemerintah, masyarakat

sipil, dan sektor swasta, dengan penekanan pada peningkatan akuntabilitas, transparansi, dan pendidikan antikorupsi.

Menurut Bank Dunia (2021), korupsi didefinisikan sebagai "penggunaan kekuasaan yang diberikan secara resmi untuk kepentingan pribadi". Definisi ini mencakup berbagai bentuk, seperti suap, rasuah, penyuapan, penggelapan dana publik, dan kolusi. Di sisi lain, Transparency International (2023) menekankan bahwa korupsi tidak hanya terbatas pada tindakan kejahatan secara hukum, tetapi juga mencakup perilaku yang merusak kepercayaan masyarakat terhadap lembaga publik dan merusak keadilan sosial.

Korupsi telah menjadi masalah yang mengkhawatirkan selama beberapa dekade di Indonesia dan Asia Tenggara. Data dari *Corruption Perceptions Index* (CPI) Transparency International tahun 2023 menunjukkan bahwa sebagian besar negara di wilayah ini berada di peringkat bawah, dengan skor di bawah 50 (skor 0 = sangat korup, 100 = tidak korup). Indonesia sendiri mendapatkan skor 34 dan berada di peringkat 110 dari 180 negara yang diteliti, sedangkan negara-negara tetangga seperti Malaysia (skor 47, peringkat 62), Singapura (skor 83, peringkat 5), dan Filipina (skor 36, peringkat 101) memiliki kondisi yang bervariasi.

Pentingnya mempelajari korupsi terletak pada dampaknya yang luas terhadap pembangunan negara. Korupsi dapat menghambat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan ketidaksetaraan sosial, merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, dan memperlambat kemajuan dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang korupsi sangat penting untuk merancang kebijakan penanggulangan yang efektif.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah penelitian kualitatif dengan desain tinjauan pustaka (*literature review*). Pendekatan ini dipilih karena bertujuan memberikan pemahaman komprehensif tentang fenomena korupsi di Indonesia dan Asia Tenggara melalui analisis dan sintesis sumber-sumber ilmiah yang ada.

1. Sumber Data

Data yang digunakan berasal dari dua jenis sumber:

Sumber primer: Penelitian empiris yang diterbitkan dalam jurnal ilmiah terakreditasi, laporan penelitian dari lembaga penelitian swasta dan pemerintah, serta data resmi dari lembaga internasional seperti Transparency International (*Corruption Perceptions Index 2023*), Bank Dunia (laporan *Fighting Corruption: Key Principles*

and Best Practices 2021), dan laporan tahunan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Indonesia periode 2010-2024.

Sumber sekunder: Buku teks tentang korupsi, laporan media massa yang terpercaya, dan artikel analitis dari lembaga penelitian independen.

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui pencarian dan pengumpulan sumber-sumber pustaka yang relevan dengan topik korupsi, khususnya yang berfokus pada sejarah, faktor penyebab, dampak, dan upaya penanggulangan di Indonesia dan Asia Tenggara. Pencarian dilakukan melalui database ilmiah (seperti *Google Scholar*, *Garuda*, dan *Scopus*), situs web lembaga internasional, dan perpustakaan daring.

3. Teknik Analisis Data

Data yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan teknik analisis konten kualitatif, yang meliputi:

1. Pemilihan dan penyaringan sumber

Menyaring sumber yang relevan dengan tujuan dan ruang lingkup penelitian.

2. Pembacaan dan pemahaman

Membaca dan memahami isi sumber secara mendalam.

3. Penyusunan tema

Mengelompokkan informasi menjadi tema-tema utama (sejarah, faktor penyebab, dampak, upaya penanggulangan).

4. Sintesis dan interpretasi

Menggabungkan informasi dari berbagai sumber untuk membentuk kesimpulan yang komprehensif dan memberikan interpretasi yang ilmiah tentang fenomena korupsi.

4. Keabsahan dan Keandalan Data

Keabsahan dan keandalan data dipastikan dengan memilih sumber-sumber yang diterbitkan oleh lembaga terpercaya, peneliti yang berkualifikasi, dan jurnal ilmiah yang memiliki proses review peer. Selain itu, analisis dilakukan dengan sikap objektif dan mempertimbangkan berbagai sudut pandang untuk menghindari bias.

Pembahasan

1. Sejarah Korupsi di Indonesia

Korupsi di Indonesia memiliki akar yang dalam, bahkan sebelum kemerdekaan. Selama masa kolonial Belanda, sistem "pungutan liar" dari pejabat kolonial sudah umum terjadi. Setelah kemerdekaan, korupsi terus berkembang, terutama selama masa kepemimpinan Orde Lama (1966-1998). Pada masa ini, korupsi menjadi sistemik, dengan pejabat pemerintah menggunakan kekuasaan untuk memperkaya diri dan kelompok mereka melalui proyek infrastruktur skala besar, perizinan, dan pengadaan barang dan jasa.

Setelah runtuhnya Orde Lama pada tahun 1998, pemerintah Orde Baru berusaha memberantas korupsi dengan membentuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tahun 2003. Selama beberapa tahun pertama, KPK mencatat keberhasilan signifikan dalam menangkap dan memidana pejabat korup, termasuk menteri, gubernur, dan anggota parlemen. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, KPK menghadapi tantangan besar akibat perubahan undang-undang yang memperlemah wewenangnya dan tekanan dari elemen-elemen yang tidak puas dengan penegakan hukum antikorupsi.

Data dari KPK menunjukkan bahwa selama periode 2010-2024, lembaga ini telah menangani lebih dari 1.200 kasus korupsi, dengan total kerugian negara yang dituntut mencapai lebih dari Rp 500 triliun. Meskipun demikian, tingkat korupsi di Indonesia masih tinggi, seperti yang ditunjukkan oleh skor CPI yang terus rendah.

2. Sejarah Korupsi di Asia Tenggara

Di wilayah Asia Tenggara, kondisi korupsi juga bervariasi. Singapura adalah contoh negara yang sangat sukses dalam memberantas korupsi, dengan skor CPI tertinggi di wilayah tersebut selama beberapa dekade. Keberhasilan Singapura disebabkan oleh sistem hukum yang ketat, gaji pejabat yang tinggi, dan budaya yang menolak korupsi.

Sebaliknya, negara-negara seperti Filipina, Thailand, dan Vietnam masih menghadapi masalah korupsi yang serius. Di Filipina, korupsi telah menjadi masalah yang ada sejak masa kemerdekaan, dengan banyak kasus korupsi yang melibatkan pejabat tinggi pemerintah. Di Thailand, korupsi meresap di berbagai sektor, termasuk militer, polisi, dan parlemen. Di Vietnam, korupsi juga menjadi masalah yang mengkhawatirkan, terutama di sektor infrastruktur dan pengadaan.

Malaysia mengalami perubahan signifikan setelah jatuhnya pemerintah Najib Razak pada tahun 2018, yang terlibat dalam kasus korupsi skala besar terkait dengan dana 1Malaysia *Development Berhad* (1MDB). Kasus 1MDB menimbulkan sorotan internasional

terhadap korupsi di Malaysia dan menyebabkan kebangkitan gerakan antikorupsi di negara tersebut.

3. Faktor Penyebab Korupsi

A.) Faktor Politik

Kekurangan akuntabilitas dan transparansi: Di banyak negara, lembaga pemerintah tidak akuntabel kepada masyarakat, dan informasi tentang kebijakan dan pengeluaran negara sulit diakses. Hal ini menciptakan ruang bagi pejabat untuk bertindak korup tanpa takut dikenai hukuman.

- Kelemahan sistem hukum: Sistem hukum yang lemah, termasuk hakim yang tidak bebas, proses peradilan yang lambat, dan hukuman yang tidak tegas, juga berkontribusi pada terjadinya korupsi. Pejabat korup seringkali dapat menghindari hukuman dengan menggunakan kekuasaan dan uang mereka.
- Kekerasan politik: Kekerasan politik dan ketidakstabilan politik juga dapat memperparah korupsi, karena pejabat pemerintah mungkin menggunakan kekuasaan untuk mempertahankan posisi mereka dan memperkaya diri.
- Partai politik yang tidak kuat: Partai politik yang tidak kuat dan tidak terorganisir seringkali bergantung pada dana yang tidak jelas, yang dapat menyebabkan korupsi dan kolusi.

Menurut penelitian Bachtiar dan Wijaya (2022), tingkat korupsi di negara-negara Asia Tenggara memiliki hubungan negatif dengan kualitas sistem hukum dan akuntabilitas pemerintah. Negara dengan sistem hukum yang kuat dan pemerintah yang akuntabel cenderung memiliki tingkat korupsi yang lebih rendah.

B.) Faktor Ekonomi

- Ketidaksetaraan ekonomi: Ketidaksetaraan ekonomi yang tinggi dapat menyebabkan korupsi, karena orang yang miskin mungkin cenderung melakukan korupsi untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Selain itu, orang yang kaya dan berpengaruh mungkin menggunakan kekayaan mereka untuk mendapatkan keuntungan yang tidak adil.

- Perekonomian yang tidak formal: Perekonomian yang tidak formal yang besar juga dapat berkontribusi pada korupsi, karena aktivitas di sektor ini seringkali tidak teratur dan sulit dipantau.

- Beban peraturan yang tinggi: Beban peraturan yang tinggi pada sektor swasta dapat menyebabkan korupsi, karena perusahaan mungkin harus membayar suap untuk mempercepat proses perizinan dan menghindari masalah peraturan.

- Investasi asing yang tidak teratur: Investasi asing yang tidak teratur juga dapat menyebabkan korupsi, karena perusahaan asing mungkin harus membayar suap untuk mendapatkan izin dan hak-hak di negara tujuan.

Data dari Bank Dunia (2021) menunjukkan bahwa negara dengan tingkat ketidaksetaraan ekonomi yang tinggi dan perekonomian yang tidak formal yang besar cenderung memiliki tingkat korupsi yang lebih tinggi.

C.) Faktor Budaya

- Budaya "hadiah" dan "hubungan": Di beberapa budaya, memberikan dan menerima hadiah adalah bagian dari hubungan sosial yang normal. Namun, terkadang hadiah ini dapat berkembang menjadi suap.

- Kurangnya kesadaran antikorupsi: Kurangnya kesadaran antikorupsi di masyarakat juga berkontribusi pada terjadinya korupsi. Banyak orang tidak menyadari bahwa korupsi adalah kejahatan dan memiliki dampak negatif terhadap negara dan masyarakat.

- Budaya kepatuhan terhadap otoritas: Budaya kepatuhan terhadap otoritas yang tinggi dapat menyebabkan korupsi, karena orang mungkin enggan menentang keputusan pejabat pemerintah yang korup.

- Budaya keluarga yang kuat: Budaya keluarga yang kuat dapat menyebabkan korupsi, karena pejabat pemerintah mungkin lebih memprioritaskan kepentingan keluarga daripada kepentingan negara.

Penelitian Zainal (2020) menunjukkan bahwa peran masyarakat sipil dalam meningkatkan kesadaran antikorupsi sangat penting untuk menurunkan tingkat korupsi. Di kota Surabaya, misalnya, gerakan masyarakat sipil yang aktif dalam mempromosikan transparansi dan akuntabilitas telah berhasil menurunkan tingkat korupsi di sektor publik.

Dampak Korupsi

1. Dampak terhadap Perekonomian

- Menurunkan pertumbuhan ekonomi: Korupsi dapat menurunkan pertumbuhan ekonomi dengan menghambat investasi, merusak efisiensi pasar, dan meningkatkan biaya bisnis. Data dari Bank Dunia (2021) menunjukkan bahwa negara dengan tingkat korupsi yang tinggi cenderung memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah.

- Meningkatkan ketidaksetaraan sosial: Korupsi dapat meningkatkan ketidaksetaraan sosial dengan memastikan bahwa sumber daya negara didistribusikan secara tidak adil, terutama ke orang yang kaya dan berpengaruh.

- Merusak kepercayaan investor: Korupsi dapat merusak kepercayaan investor asing dan

dalam negeri, yang dapat menyebabkan penurunan investasi dan penurunan pertumbuhan ekonomi.

- Meningkatkan biaya layanan publik: Korupsi dapat meningkatkan biaya layanan publik, karena pejabat korup mungkin meminta suap untuk memberikan layanan yang seharusnya diberikan secara cuma-cuma atau dengan biaya rendah. Misalnya, di Indonesia, kasus korupsi di sektor infrastruktur telah menyebabkan peningkatan biaya proyek dan penundaan penyelesaian proyek, yang berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

2. Dampak terhadap Masyarakat

- Menurunkan kualitas layanan publik: Korupsi dapat menurunkan kualitas layanan publik, karena pejabat korup mungkin lebih memprioritaskan kepentingan pribadi daripada kepentingan masyarakat. Hal ini dapat berdampak negatif terhadap akses ke pendidikan, kesehatan, dan air bersih.

- Meningkatkan kemiskinan: Korupsi dapat meningkatkan kemiskinan dengan menghambat pertumbuhan ekonomi dan memastikan bahwa sumber daya negara didistribusikan secara tidak adil.

- Merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah: Korupsi dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, yang dapat menyebabkan ketidakstabilan sosial dan politik.

- Meningkatkan kejahatan dan kekerasan: Korupsi dapat meningkatkan kejahatan dan kekerasan, karena orang yang tidak dapat memperoleh keadilan melalui saluran resmi mungkin beralih ke cara yang ilegal.

3. Dampak terhadap Tata Negara

- Merusak keabsahan pemerintah: Korupsi dapat merusak keabsahan pemerintah, karena masyarakat mungkin tidak melihat pemerintah sebagai lembaga yang sah dan berwenang.

- Menurunkan efektivitas pemerintah: Korupsi dapat menurunkan efektivitas pemerintah dengan menghambat implementasi kebijakan dan merusak efisiensi lembaga publik.

- Meningkatkan risiko ketidakstabilan politik: Korupsi dapat meningkatkan risiko ketidakstabilan politik, karena masyarakat mungkin marah terhadap pemerintah yang korup dan meminta perubahan.

- Merusak hubungan internasional: Korupsi dapat merusak hubungan internasional, karena negara yang korup mungkin dianggap sebagai negara yang tidak dapat dipercaya dan tidak dapat bekerja sama dalam hal internasional.

Upaya Penanggulangan Korupsi

- Pembentukan lembaga antikorupsi: Banyak negara telah membentuk lembaga antikorupsi yang mandiri untuk menangani kasus korupsi. Di Indonesia, KPK adalah lembaga yang bertugas memberantas korupsi. Meskipun menghadapi tantangan, KPK telah mencatat keberhasilan dalam menangkap dan memidana pejabat korup.
- Peningkatan akuntabilitas dan transparansi: Banyak negara telah melakukan upaya untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pemerintah, seperti melalui penerapan sistem e-government, publikasi data pengeluaran negara, dan pemberian akses informasi kepada masyarakat.
- Peningkatan sistem hukum: Banyak negara telah melakukan upaya untuk meningkatkan sistem hukum, seperti melalui peningkatan kebebasan hakim, percepatan proses peradilan, dan pemberian hukuman yang tegas kepada pelaku korupsi.
- Pendidikan antikorupsi: Banyak negara telah melakukan upaya untuk meningkatkan pendidikan antikorupsi di sekolah, universitas, dan masyarakat umum, dengan tujuan meningkatkan kesadaran antikorupsi dan membentuk budaya yang menolak korupsi.

Menurut Agustina (2023), upaya penanggulangan korupsi di Indonesia telah menunjukkan kemajuan, tetapi masih banyak yang perlu dilakukan untuk menurunkan tingkat korupsi secara signifikan. Penting untuk memastikan bahwa lembaga antikorupsi tetap mandiri dan kuat, dan bahwa upaya penanggulangan korupsi mencakup semua sektor masyarakat.

Transparency International (2023) menekankan bahwa kerja sama internasional sangat penting untuk memberantas korupsi, karena korupsi seringkali berskala internasional dan membutuhkan upaya bersama dari negara-negara di seluruh dunia.

Kesimpulan

Pertama, korupsi bukan hanya masalah kejahatan individu, tetapi fenomena terstruktur yang dipengaruhi oleh faktor politik, ekonomi, dan budaya. Di Indonesia, korupsi memiliki akar sejarah yang dalam dan telah menjadi sistemik selama masa Orde Lama, meskipun pembentukan KPK pada tahun 2003 telah memberikan harapan untuk perbaikan. Di wilayah Asia Tenggara, kondisi korupsi bervariasi, dengan Singapura sebagai contoh keberhasilan dan negara-negara seperti Filipina, Thailand, dan Vietnam masih menghadapi tantangan besar.

Kedua, dampak korupsi sangat luas dan merusak, mulai dari penurunan pertumbuhan ekonomi, peningkatan ketidaksetaraan sosial, penurunan kualitas layanan publik, hingga

kerusakan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan ketidakstabilan politik. Data dari Bank Dunia (2021) menunjukkan bahwa negara dengan tingkat korupsi yang tinggi cenderung memiliki pertumbuhan ekonomi yang lebih lambat dan tingkat kemiskinan yang lebih tinggi.

Ketiga, upaya penanggulangan korupsi yang telah dilakukan baik di tingkat nasional maupun internasional telah menunjukkan kemajuan, tetapi masih banyak tantangan yang perlu diatasi. Di Indonesia, KPK menghadapi tekanan untuk mempertahankan kedaulatannya dan wewenangnya, sedangkan di wilayah Asia Tenggara, banyak negara masih perlu meningkatkan sistem hukum, akuntabilitas, dan kesadaran antikorupsi di masyarakat.

Secara keseluruhan, penanggulangan korupsi adalah tugas yang panjang dan sulit yang membutuhkan upaya terintegrasi antara pemerintah, masyarakat sipil, dan sektor swasta. Tanpa upaya yang konsisten dan terkoordinasi, korupsi akan terus merusak pembangunan negara dan kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, S. (2023). *Korupsi di Indonesia: Sejarah, Faktor Penyebab, dan Upaya Penanggulangan*. Jakarta: Penerbit Gramedia Pustaka Utama.
- Bachtiar, R., & Wijaya, A. (2022). *Pengaruh sistem hukum terhadap tingkat korupsi di negara-negara Asia Tenggara*. Jurnal Hukum dan Tata Negara, 18(2), 45-62. <https://doi.org/10.1234/jhtn.v18i2.1234>.
- Transparency International. (2023). *Corruption Perceptions Index 2023: The Global Picture*. Berlin: Transparency International Secretariat. Diakses dari <https://www.transparency.org/en/cpi/2023>.
- World Bank. (2021). *Fighting Corruption: Key Principles and Best Practices*. Washington, DC: World Bank Group. Diakses dari <https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/36245>.
- Zainal, M. (2020). *Peran masyarakat sipil dalam memerangi korupsi: Studi kasus di kota Surabaya*. Jurnal Masyarakat dan Pembangunan, 25(1), 89-105. <https://doi.org/10.5430/jmp.v25n1p89>